



**KESEPAKATAN**  
**GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA**  
**SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**  
**HASIL RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA**  
**SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-10-2017) bertempat di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diadahi dengan Rapat Teknis Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota pada tanggal 19-10-2017, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan, pengembangan dan peningkatan kualitas BUMDes dalam mengembangkan potensi unggulan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi desa dan dengan membangun Desa Mart sebagai warung serba ada di desa;
2. Dalam rangka percepatan penyusunan Perda RZW/P3K, Bupati dan Walikota mendukung sepenuhnya tahapan proses penyusunan Dokumen RZW/P3K;
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerja sama membentuk koperasi primer komoditas lada di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan cabang di setiap Kabupaten/Kota;

4. Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan PT. Jamkrida Bangka Belitung sebagai perusahaan daerah, sampai saat ini masih ada 4(empat) Kabupaten/Kota yang harus menyertakan sahamnya masing-masing minimal Rp. 5.000.000.000,- yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang;
5. Program pengembangan integrasi sapi dan sawit dikembangkan bersama-sama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota karena sebagian besar izin perkebunan sawit kewenangannya ada di Kabupaten/Kota;
6. Bangka Belitung akan dipersiapkan menjadi tuan rumah pertemuan Kontak Tani Nasional sehingga diperlukan dukungan 7 Kabupaten/Kota dalam pengusulan maupun pelaksanaan;
7. Program bantuan desa berbentuk bibit lada dan sapi dari Provinsi akan dijalankan mulai tahun 2018 yang akan didukung oleh para Bupati;
8. Even-even pariwisata di Kabupaten/Kota akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga provinsi dapat mendukungnya menjadi even-even nasional dan internasional;
9. Pengembangan resi gudang dalam rangka stabilisasi harga lada ditingkat petani akan didukung oleh Bupati/Walikota terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 0,5 Ha masing-masing Kabupaten/Kota, yang sekaligus akan mendorong kembalinya kejayaan lada Bangka Belitung;
10. Kesepakatan secara konkrit dan terinci antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dibuat di : Sungailiat  
Pada tanggal tersebut diatas.

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DR. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

BUPATI  
BANGKA,

Ir. H. TARMIZI H. SMAT, MM

BUPATI  
BANGKA TENGAH,

Ir. H. IBNU SALEH, MM

BUPATI  
BANGKA SELATAN,

Drs. H. JUSTIAR NOER, ST, MM, M.Si

BUPATI  
BANGKA BARAT,

Drs. H. PARHAN ALI, MM

BUPATI  
BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

BUPATI  
BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA, SE

WALIKOTA  
PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWAN SYAH, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN :

**HASIL KESEPAKATAN GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA  
PADA HASIL RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA  
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DI TANJUNG PESONA SUNGAILIAT, TANGGAL 19 S/D 20 OKTOBER 2017**

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi	Komitmen	
				Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	<b>Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<p>1. Belum maksimalnya penyampaian materi daya tarik wisata yang akan dipromosikan melalui media cetak, elektronik dan digital melalui media lokal, nasional dan internasional</p> <p>2. Kurangnya pelaksanaan promosi bersama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p>	<p>Membentuk Tim Kreatif untuk Pemasaran Digital</p> <p>1. Pelaksanaan Pameran Potensi Daerah secara bersama di tahun 2018 yang diselenggarakan di Dalam Negeri sebanyak 2 kali antara lain: a. Event Gebyar Wisata Nusantara (Jakarta) b. Asian Games (Palembang)</p> <p>2. Promosi dan Publikasi Bersama Event Internasioanal yang diselenggarakan di Daerah yaitu a. MXXGP International Event b. Jet Ski International c. DII</p>	<p>Provinsi Mengkoordinir pembentukan Tim Kreatif Digital</p> <p>Mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan promosi/pameran bersama</p>	<p>Mengyiapkan bahan promosi</p> <p>Mengyiapkan / mengalokasikan anggaran pameran di APBD kabupaten/kota masing-masing</p>
			<p>2. Promosi dan Publikasi Bersama Event Internasioanal yang diselenggarakan di Daerah yaitu a. MXXGP International Event b. Jet Ski International c. DII</p>	<p>Mendukung, memfasilitasi dan mempromosikan serta mempublikasikan event internasional mulai dari sekarang.</p>	<p>Mendukung, memfasilitasi dan menyediakan bahan promosi dan atraksi seni budaya</p>

		<p>3. Belum tersusunnya kalender event yang mengakomodir event kabupaten/ kota ketingga nasional.</p>	<p>Menyusun Kalender Event Wisata dan Budaya di Kabupaten/Kota menjadi kalender Event Nasional.</p>	<p>Mendorong, mendukung dan mengusulkan event kabupaten/kota menjadi kalende revent nasional</p>	<p>Menyepakati 2 event wisata dan budaya kabupaten/kota menjadi kalender event nasional Adapun eventnya sebagai berikut:  1. Kabupaten Bangka  a. Jazz on the Beach  b. Sungailiat Triathlon  2. Kabupaten Bangka Selatan  a. Toboali City On Fire  b. Festival Bahari/Archipelago Festival  3. Kabupaten Bangka Barat  a. Wisata Kebangsaan  b. Festival Jiran Nusantara  4. Kabupaten Bangka Tengah  a. ParijatTebing  b. MTB Offroad  5. Kabupaten Belitung  a. Pesona Belitung Beach Festival  b. Festival Negeri Pelangi</p>
--	--	---	---	--	---

					6. Kabupaten Belitung Timur a. Beltim Fashion Carnival b. Kater Festival 7. Kota Pangkalpinang a. Cheng Beng b. Pangkalpinang Fair
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>				
	1. Belum terbentuknya BUMDes				
	a. Kelembagaan (sesuai data 38% BUMDes yang belum terbentuk dari 309 BUMDes)	a. Sharing anggaran antara provinsi dengan kabupaten untuk percepatan pembentukan dan peningkatan kapasitas BUMDes	a. Peningkatan/penguatan kapasitas BUMDes oleh provinsi	a. Pembentukan BUMDes di Kabupaten	
	b. Kualitas SDM yang belum optimal	b. Penguatan kapasitas	b. Percepatan pembentukan BUMDes melalui pembinaan bagi pengurus BUMDes	b. Penguatan kelembagaan BUMDes melalui regulasi daerah	
	c. Sarana dan prasarana - Status aset	c. Percepatan penyelesaian status aset	c. Identifikasi aset	c. Penyelesaian tertib administrasi terkait tata kelola aset	
	2. Lemahnya pengawasan terhadap kinerja BUMDes	Penguatan fungsi pengawasan terkait kinerja BUMDes	Pembinaan, pengendalian dan evaluasi	Penguatan pengawasan kinerja BUMDes	

3.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
<p>1. Nilai Tambah dan Daya saing produk KUKM masih rendah</p> <p>2. Belum Optimalnya perkuatan permodalan KUKM</p>	<p>a. Penyertaan kab/kota pd modal PT. Jamkrida Babel</p> <p>b. penyediaan bunga kredit subsidi modal kerja</p> <p>c. perlu dibentuk PLUT Mandiri</p>	<p>a. Setoran Provinsi Kep. Babel sudah berjumlah 22,5 M</p> <p>b. Pemerintah provinsi sudah menganggarkan sebesar 812.500.000 subsidi bunga kredit modal kerja bekerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung</p> <p>c. PLUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terbentuk</p>	<p>a. Pemerintah Kab/Kota yang belum menyertakan modal ke PT. Jamkrida akan menganggarkan di APBDP 2018 atau APBD 2019 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah</p> <p>b. Pemerintah Kab/Kota akan mempersiapkan UMKM yang produktif untuk mendukung program ini</p> <p>c. Menyiapkan lahan yang dilokasi yang strategis</p>



4.	Perindustrian dan Perdagangan			
	<p>1. RPIP DAN RPIK</p> <p>- Belum semua Kabupaten/kota mempunyai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)</p> <p>- Belum adanya Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Kabupaten/Kota (RPIK)</p>	<p>Penganggaran dan penyelesaian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) beserta perdanya</p>	<p>Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) padatahun 2018</p>	<p>- Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) bagi Kabupaten yrnag sudah ada kajiannya pada tahun 2018</p> <p>- Pembuatan kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) beserta penetapan Perdanya bagi Kabupaten /Kota yang belum ada kajiannya pada tahun 2018</p>
	<p>2. SISTEM RESI GUDANG</p> <p>- Lahan belum Tersedia</p> <p>- Belum adanya gudang yang Representative</p>	<p>- Penyiapan lahan untuk pembangunan gudang</p> <p>- Pembangunan gudang</p>	<p>-Penganggaran pembangunan gudang pada tahun 2019</p>	<p>- Penyiapan lahan Minimal 0,5 Ha pada tahun 2018</p> <p>- Melengkapi sarana dan prasarana gudang pada tahun 2018</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya Pengelola gudang yang memiliki izin Kelola resi gudang</li> <li>- Kurangnya sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan calon pengelola melalui diklat di Bappebti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi tingkat Kab/Kota pada tahun 2018 dan 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganggarkan pelatihan calon pengelola gudang Pada tahun 2018</li> <li>- Melakukan sosialisasi sampai ke desa Pada tahun 2018 dan 2019</li> </ul>
<b>5. Pertanian</b>						
1	Sub Sektor Perkebunan					
	1. Regulasi	<p>Belum Tersedianya Regulasi/Peraturan Tentang Kewajiban Perusahaan Besar Swasta Melaksanakan Program Integrasi Sapi Sawit</p>		<p>Penetapan Perda Tentang Penatausahaan Perkebunan Kelapa Sawit Besar Swasta Terutama Terkait Pelaksanaan Program Integrasi Sapi-Sawit Pada Perkebunan Besar Swasta</p>	<p>Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Integrasi Sapi-Sawit Pada Perkebunan Besar Swasta</p>	
	2. Lahan	<p>Pemanfaatan Lahan Belum Optimal</p>		<p>Perluasan Dan Pengembangan Serta Penyediaan Sarana Produksi Serta Sarana Prasarana</p>	<p>Menjamin Ketersediaan Dan Penetapan Lahan/Areal Untuk Perluasan Dan Pengembangan Lada Melalui Penyediaan Database Per Desa Dan Dilengkapi Titik Koordinat</p>	

II		Sub Sektor Tanaman Pangan					
	1. Lahan Dan Produksi	Pemanfaatan Lahan Dan Produksi Masih Rendah		Perluasan Areal Sawah, Penyediaan Sarana Produksi Dan Alsintan		Optimasi Lahan Sawah	
	2. Air	Pengelolaan Dan Infrastruktur Air Terbatas		Pembangunan Dan Pengembangan Irigasi Sesuai Kewenangan (1.000 - 3.000 Ha)		Pembangunan Dan Pengembangan Irigasi Sesuai Kewenangan (0-1.000 Ha)	
III		Sub Sektor Peternakan					
	1. Peningkatan Populasi Dan Produksi	Populasi Dan Produksi Ternak Khususnya Sapi Masih Rendah		Pelaksanaan Upsus Siwab Melalui Penyediaan Saprodi Ib		Operasionalisasi Dan Mobilisasi Petugas Dan Saprodi	
	2. Benih	Keterbatasan Benih Sapi		Penyediaan Sapi Indukan		Penyediaan Kandang	
	3. Pakan	Keterbatasan Pakan Ternak		Penyediaan Kebun Hijauan Pakan Berkualitas		Penyiapan Lahan, Pendampingan Dan Operasionalisasi	
IV		Bidang Penyuluhan					
	1. Agenda Nasional	Masih Terbatasnya Pelaksanaan Even Nasional Pertanian di Bangka Belitung		Fasilitasi Rembug Tani KTNA Tahun 2018 Menuju PENAS Tahun 2023		Berpartisipasi dalam Pameran/Expo Rembug Tani KTNA Tahun 2018 (Minimal 2 Stand Per Kab/Kota) Dan Bantuan Penyediaan Transportasi Peserta Rembug Tani	

2. SDM Petani Dan Penyuluh Pertanian	Kapasitas Sdm Petani Dan Petugas		Penyediaan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu Di UPTD Provinsi	Menyiapkan Dan Mengendalikan Petani Dan PPL Mengikuti Kegiatan Pelatihan Pertanian Terpadu Di UPTD Provinsi
<b>6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)</b>				
	1. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan RZWP3K sebagian masih dalam bentuk manual dan belum terintegrasi.	1. Agar OPD terkait membantu konsultan memberikan data dalam versi 'SHp'. 2. Bagi OPD yang belum memahami dalam versi 'SHp' dapat bekerjasama dengan OPD yang menangani urusan penataan ruang.	Mengakomodir semua usulan Kab/Kota terutama terkait ketersediaan data (SHp) guna percepatan Raperda RZWP3K.	1. Membantu mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan (SHp) dan adanya kesepakatan tingkat Kab/Kota terkait percepatan Raperda RZWP3K. 2. Pengumpulan data paling lambat disampaikan ke DKP Provinsi minggu ke 4 (empat) bulan oktober 2017.
	2. Sebagian besar pemanfaatan wilayah laut eksisting dan rencana pemanfaatan wilayah laut berada di peta zona pertambangan.	1. Dalam rangka pemanfaatan ruang laut secara efektif dan efisien maka IUP yang sudah berakhir masa berlakunya tidak diperpanjang.	1. Melaksanakan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan dilakukan FGD dengan stakeholder terkait	1. Mendukung kebijakan pemerintah provinsi.

			<p>2. Bagi IUP yang tidak aktif dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai perundang-undangan yang berlaku  Pemerintah Provinsi mengambil alih untuk peruntukan yang lain.</p> <p>3. Bagi IUP eksplorasi yang akan ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi harus mempertimbangkan prioritas sektor lain/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota</p>		
--	--	--	---	--	--